

# ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) BARANG MILIK DAERAH

**Supriyanto**

Magister Akuntansi Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta  
email: supriyantokita@gmail.com

## ***Abstract***

*After the enactment of Law No. 23 of 2014 on Regional Government, and Government Regulation No. 27 of 2014 on the Assets Management of State/Regions, each region must be manage its assets in an orderly administration, the rule of law, and physical order. To facilitate the local government in assets management, has been developed the Regional Management Information System-Regional Assets (SIMDA-BMD). This paper discusses the analysis of the implementation of SIMDA-BMD on Local government of Banjarnegara. The purpose of this paper is to determine how SIMDA-BMD process data into information, internal controls have been applied, and the characteristics of the quality of information produced. The result of this paper, SIMDA-BMD is good in processing data becomes information and internal control that is applied is sufficient. The information quality produced by SIMDA-BMD is meet the relevant quality characteristics, but has not completely reliable because the book value is equal to the purchase price, it is because SIMDA-BMD does not have the depreciation facility.*

***Key words:*** *Regional Assets, Management Information System, Management Asset.*

## **1. PENDAHULUAN**

Setelah berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 menyebabkan terjadinya perubahan paradigma dalam pengelolaan barang milik daerah atau aset daerah dari yang awalnya sekedar administratif menjadi pengelolaan yang lebih tertib, akuntabel dan transparan. Barang Milik Daerah (BMD) merupakan aset Pemerintah Daerah yang harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kinerja pemerintahan. Sehingga aset dianggap memiliki peranan yang penting dalam mendukung kelancaran operasional organisasi (Putra, 2013). Oleh karena itu BMD harus dikelola dengan prinsip efektif, efisien, profesional dan modern dengan mengedepankan *good governance* sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Pada setiap akhir tahun anggaran, Pemerintah Daerah wajib menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerahnya kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menyebutkan bahwa laporan BMD harus disajikan dalam LKPD berupa neraca pemerintah daerah. Laporan keuangan yang

disampaikan oleh Pemerintah Daerah harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga informasi yang dilaporkan dapat dijadikan dasar perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan, informasi merupakan hal yang sangat penting. Untuk itu, dibutuhkan suatu sistem informasi terintegrasi untuk mengolah data dan menyajikan informasi barang milik daerah secara cepat, tepat dan akurat.

Penerapan sistem informasi akuntansi bagi pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005. BPKP melalui Tim Aplikasi SIMDA pada Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD). Program aplikasi SIMDA-BMD adalah suatu program aplikasi yang digunakan untuk melakukan proses pengelolaan BMD secara terkomputerisasi yang bertujuan untuk menyelaraskan penerapan kebijakan pengelolaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SIMDA-BMD diharapkan mampu mendukung tercapainya akuntabilitas pemerintah daerah baik di tingkat Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) ataupun di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pemerintah Kabupaten Banjarnegara merupakan salah satu Pemerintah Daerah yang telah menerapkan SIMDA-BMD Versi 2.0.0.1 (*build* : 2012.05.30) untuk penatausahaan barang milik daerah. Makalah ini disusun untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah yang telah diterapkan pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana SIMDA-BMD mengolah data barang milik daerah menjadi informasi, pengendalian intern dari sistem yang telah diterapkan, dan karakteristik kualitas informasi laporan hasil keluaran (*output*) yang dihasilkan dari SIMDA-BMD.

Sistematika penulisan makalah ini diawali dengan pendahuluan, dilanjutkan dengan kajian pustaka yang relevan kemudian di bagian selanjutnya akan menguraikan pembahasan yang berisikan bukti-bukti dari implementasi sistem informasi tersebut. Pada bagian akhir dari makalah ini disampaikan kesimpulan dan saran untuk pengembangan sistem informasi kedepannya.

## **2. KAJIAN LITERATUR**

### **2.1. Sistem Informasi Barang Milik Daerah**

Menurut PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang dimaksud Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau dari perolehan lainnya yang sah.

Peraturan Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 menyatakan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah meliputi: Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan Undang-Undang atau Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah mendefinisikan aset yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Banjarnegara, aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari masa manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria antara lain (1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, (2) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, (3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, (4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan (5) memenuhi nilai minimal yang dapat dikapitalisasi.

BMD memiliki siklus penatausahaan yang dimulai dari perencanaan; penentuan kebutuhan; penganggaran; pengadaan; penyimpanan dan pengeluaran; penggunaan; pemanfaatan; pembinaan, pengendalian dan pengawasan; pemeliharaan; dan penghapusan.

Dewi (2014) menyebutkan Sistem Informasi Manajemen Daerah adalah sistem pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi yang dapat membantu pemerintah daerah menghasilkan informasi keuangan yang relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya. Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Aset juga dapat meningkatkan kinerja organisasi dan berpengaruh signifikan terhadap penguatan sistem pengendalian intern (Arifin & Wulandari, 2014).

Kecanggihan dari aplikasi teknologi informasi berpengaruh terhadap efektivitas implementasi Sistem Informasi Akuntansi (Ratnaningsih & Suaryana, 2014). Sehingga pada awal peluncurannya SIMDA-BMD telah dikembangkan sesuai dengan peraturan terkini, direncanakan terintegrasi dengan SIMDA Keuangan dan terdapat kesinambungan pengembangan aplikasi. Keterkaitan antara sistem informasi aset dengan sistem informasi keuangan akan memberikan keuntungan dengan dapat dilakukannya *cek and balance* antara arus kas dan arus aset (Rahayu, et. al, 2014). Program aplikasi SIMDA-BMD digunakan untuk pengelolaan barang milik daerah yang meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang daerah (bpkp, 2015). Setiap sub sistem dari aplikasi menghasilkan output sebagai berikut:

1. Sub sistem perencanaan menghasilkan Daftar Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan, Daftar Rencana Pengadaan Barang Daerah dan Daftar Rencana Pemeliharaan Barang Daerah.
2. Sub sistem pengadaan menghasilkan Daftar Hasil Pengadaan, Daftar Hasil Pemeliharaan Barang, dan Daftar Kontrak Pengadaan.
3. Sub sistem penatausahaan menghasilkan Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu (sejarah) Barang, Kartu Inventaris ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI), Daftar Mutasi Barang Daerah, dan Rekap Hasil Sensus, serta Label Barang.
4. Sub sistem penghapusan menghasilkan SK Penghapusan, Lampiran SK Penghapusan dan Daftar Barang yang Dihapuskan.
5. Sub sistem akuntansi menghasilkan Daftar Barang yang masuk Neraca (*Intracomptable*), Daftar Barang *Extracomptable*, Lampiran Neraca, Daftar

Penyusutan Aset Tetap, dan Daftar Aset Lainnya (Barang Rusak Berat), serta Rekapitulasi Barang Per SKPD.

## 2.2. Pengendalian Intern Sistem Informasi

Suatu sistem informasi berbasis komputer memerlukan beberapa pengendalian intern untuk menjamin bahwa sistem yang telah dirancang dapat digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang diharapkan. Ahmad, et. al (2013) menyimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa pengendalian *input* merupakan pengendalian yang paling penting untuk mendukung kesuksesan satu sistem informasi akuntansi.

Hall (2011) menyatakan bahwa terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam pengendalian sistem informasi berbasis komputer antara lain:

1. Pengendalian internet dan intranet yang meliputi pengendalian risiko dari ancaman subversif seperti pembajak/*hacker* dapat diaplikasikan dengan penerapan *firewall*, dan enkripsi. Sedangkan pengendalian risiko dari kegagalan peralatan dalam sistem komunikasi dapat dilakukan dengan prosedur akuisisi *hardware*, prosedur pengendalian virus, keamanan fisik *database*, dan prosedur *backup*.
2. Pengendalian pertukaran data elektronik meliputi otorisasi dan validasi transaksi serta pengendalian akses.
3. Pengendalian aplikasi merupakan prosedur manual terprogram yang dibagi menjadi tiga jenis yaitu pengendalian *input*, pengendalian proses dan pengendalian *output*.

Hal senada juga disampaikan oleh Nugraha dan Astuti (2013) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa beberapa pengendalian yang telah diterapkan dalam aplikasi SIMDA Keuangan diantaranya:

1. Pengendalian akses dan wewenang pemakai, pembatasan akses ke dalam aplikasi SIMDA dengan akun dan kata kunci serta pembagian kewenangan seperti administrator, supervisor dan operator.
2. Pengendalian keamanan yang dilakukan dengan penggunaan *uninterruptible power supply* pada komputer sebagai pengaman daya.
3. Pengendalian berdasarkan fungsi-fungsi menu secara terintegrasi ke dalam sistem untuk menjamin validitas masukan data.
4. Pengendalian aplikasi yang terdiri dari pengendalian masukan untuk mengetahui kesalahan dalam memasukkan data, pengendalian proses untuk memastikan bahwa pemrosesan data telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan pengendalian keluaran yang bertujuan untuk menjamin *output* yang dihasilkan benar dan akurat.

## 2.3. Karakteristik Kualitas Informasi Laporan/*Output*

Sambasivam (2013) menyatakan bahwa evaluasi atas implementasi sistem informasi akuntansi mempertimbangkan dua hal yaitu biaya yang digunakan untuk proses perancangan sistem harus lebih rendah daripada manfaatnya dan kualitas data yang menjadi faktor penentu keberhasilan dari sistem.

Informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan harus berkualitas, sehingga bermanfaat bagi manajemen dalam melakukan perencanaan,

pengendalian dan pengambilan keputusan. Karakteristik kualitatif dari laporan keuangan merupakan ukuran normatif yang diwujudkan untuk memenuhi tujuan informasi akuntansi.

Kieso, Weygandt & Warfield (2010) mengidentifikasi karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi yang membedakan informasi yang lebih berguna dan informasi yang kurang berguna untuk pengambilan keputusan. Kualitas dasar terdiri dari relevan dan andal, agar relevan informasi tersebut harus: (1) memiliki manfaat prediktif artinya informasi yang digunakan dapat membantu pemakai untuk membuat prediksi tentang hasil akhir dari kejadian masa lalu, masa kini dan masa depan; dan (2) memiliki manfaat umpan balik artinya informasi tersebut menyajikan keadaan di masa lalu. Informasi yang andal memenuhi kriteria: (1) lengkap artinya informasi yang dilaporkan tidak ada yang diada-adakan ataupun dihilangkan; (2) bebas dari kesalahan artinya informasi yang dilaporkan bebas dari kesalahan penyajian; dan (3) netral artinya informasi tidak memihak untuk kepentingan kelompok tertentu. Sedangkan kualitas tambahan meliputi: (1) komparatif artinya dapat dibandingkan dengan informasi yang sejenis dan (2) konsisten artinya entitas menerapkan perlakuan yang sama untuk kejadian-kejadian yang serupa.

### **3. PEMBAHASAN**

#### **3.1. Implementasi SIMDA-BMD dalam Pengolahan Data Barang Milik Daerah**

Dalam suatu sistem informasi berbasis komputer, pemrosesan data adalah aktivitas mengubah input berupa data menjadi output berupa informasi dengan menggunakan aplikasi komputer. Tahapan ini memegang peran yang sangat penting, karena kualitas data input akan mempengaruhi kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem (Alfian, 2014). Untuk itu, penggunaan program aplikasi yang tepat untuk pemrosesan data dapat menghasilkan informasi yang relevan, tepat waktu, akurat, lengkap dan ringkas. Selain penggunaan aplikasi yang tepat, menurut Iskandar (2015) pengguna Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh dalam menghasilkan informasi yang berkualitas. Dalam penatausahaan aset daerah, Pengurus Barang merupakan personil yang bertugas mengoperasikan aplikasi SIMDA-BMD.

Dalam melakukan pemrosesan data BMD, Pengurus Barang dapat memanfaatkan menu *Data Entry* di aplikasi SIMDA-BMD untuk melakukan penatausahaan BMD melalui beberapa prosedur pengolahan data berikut:

##### **1. Prosedur Perencanaan**

Prosedur perencanaan merupakan tahap awal dalam siklus pengelolaan BMD. Di dalam aplikasi SIMDA-BMD prosedur perencanaan mencakup Rencana Pengadaan dan Rencana Pemeliharaan. *Output* dari prosedur ini diantaranya Daftar Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan, Daftar Rencana Pengadaan Barang Daerah dan Daftar Rencana Pemeliharaan Barang Daerah yang dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pengadaan BMD.

##### **2. Prosedur Pengadaan**

Prosedur pengadaan pada aplikasi SIMDA-BMD merupakan prosedur lanjutan dari prosedur perencanaan yang mencakup Data Pengadaan (untuk aset baru)

dan Inventarisasi/sensus (untuk aset yang sudah ada). Pada bagian Data Pengadaan dapat digunakan untuk memantau proses pengadaan BMD sebelum dicatat sebagai aset. Dalam prosedur ini meliputi pencatatan data kontrak/Surat Perintah Kerja, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Termin dan SP2D Penunjang dan diakhiri dengan posting ke KIB.

Sedangkan pada bagian Inventarisasi dapat dimanfaatkan untuk melakukan penambahan aset dari hasil inventarisasi/sensus BMD yang mencakup Tanah (KIB A); Peralatan dan Mesin (KIB B); Gedung dan Bangunan (KIB C); Jalan, Jaringan dan Irigasi (KIB D); Buku dan Perpustakaan, Barang Bercorak Kebudayaan serta Hewan, Ternak dan Tumbuhan (KIB E); dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F).

Output dari prosedur ini antara lain Daftar Hasil Pengadaan, Daftar Hasil Pemeliharaan Barang, dan Daftar Kontrak Pengadaan.

### 3. Prosedur Penggunaan

Prosedur penggunaan dapat dimanfaatkan untuk mencatat data pengguna/pemakai BMD berdasarkan Surat Keputusan Penggunaan BMD yang telah ditetapkan.

### 4. Prosedur Penatausahaan

Prosedur penatausahaan merupakan prosedur yang digunakan untuk mengelola BMD dalam kegiatan mengubah data, memindah/mutasi BMD, kapitalisasi, koreksi dan mengubah kondisi BMD. *Output* yang dihasilkan dari prosedur ini antara lain: Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu (sejarah) Barang, Kartu Inventaris Ruang (KIR), Buku Inventaris (BI), Daftar Mutasi Barang Daerah, dan Rekap Hasil Sensus, serta Label Barang.

### 5. Prosedur Pemanfaatan

Prosedur pemanfaatan digunakan untuk mengelompokkan BMD berdasarkan pemanfaatannya. Dalam aplikasi SIMDA-BMD jenis-jenis pemanfaatan meliputi: fasilitas sosial, fasilitas umum, sewa guna usaha, kerja sama operasi, bangun serah guna dan bangun guna serah.

### 6. Prosedur Pemeliharaan

Prosedur ini dimaksudkan untuk mengolah data transaksi pemeliharaan BMD yang akan tercatat dalam riwayat namun tidak menambah kapitalisasi aset.

### 7. Prosedur Penghapusan

Prosedur penghapusan dapat digunakan untuk penghapusan aset dan penghapusan sebagian aset. Penghapusan aset menunjuk aset yang akan dihapuskan dari register aset. Prosedur ini dapat dilakukan apabila telah terbit Surat Keputusan Penghapusan BMD oleh Pengelola Barang Daerah. Output dari prosedur ini terdiri dari SK Penghapusan, Lampiran SK Penghapusan dan Daftar Barang yang Dihapuskan. Sedangkan penghapusan sebagian aset digunakan apabila sebagian aset dihapuskan karena renovasi atau sebab lainnya, prosedur ini tidak adak menghapus register aset tapi nilai aset akan berkurang.

### 8. Prosedur Akuntansi

Dari beberapa prosedur yang telah dilakukan diatas, mulai dari perencanaan sampai dengan penghapusan dan penerapan kebijakan akuntansi pada aplikasi SIMDA-BMD dapat dihasilkan output berupa Daftar Barang yang masuk Neraca (*Intracomptable*), Daftar Barang *Extracomptable*, Lampiran Neraca, dan

Daftar Aset Lainnya (Barang Rusak Berat), serta Rekapitulasi Barang Per SKPD.

Namun laporan berupa Daftar Penyusutan Aset Tetap belum bisa dihasilkan melalui aplikasi SIMDA-BMD, sehingga informasi yang disajikan tidak wajar, tidak andal dan tidak menggambarkan kondisi nilai BMD yang sesungguhnya.

### **3.2. Pengendalian Intern SIMDA-BMD dalam Pengolahan Data Barang Milik Daerah**

Aplikasi SIMDA-BMD sebagai suatu sistem informasi berbasis komputer tidak dijamin secara mutlak bebas dari kesalahan maupun kecurangan. Berikut ini adalah analisis mengenai beberapa jenis pengendalian yang telah diterapkan pada aplikasi SIMDA-BMD:

1. Pengendalian komputer yang telah diterapkan pada aplikasi SIMDA-BMD meliputi enkripsi menggunakan aplikasi *SQL Server Enterprise Manager*, aplikasi anti virus pada komputer/laptop, dan untuk mengantisipasi hilangnya *database* telah dilakukan ekspor-impor *database* dari SKPD ke Bagian Aset DPPKAD untuk dikompilasi.
2. Pengendalian fisik yang telah diterapkan berupa pembatasan akses yang dimaksudkan hanya seseorang yang mempunyai akun dan kata kunci yang sah yang bisa *login* autentikasi sistem. Selain itu aplikasi ini juga membagi tugas/kewenangan menjadi tiga kelompok yaitu administrator, supervisor dan operator.
3. Pengendalian aplikasi yang diterapkan yaitu:
  - a. Pengendalian *input*  
Data dari hasil pengadaan BMD ataupun dari hasil inventarisasi kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi. Pengendalian dokumen sumber telah dilakukan pada saat melakukan proses pengadaan maupun sensus. Perbaikan kesalahan input dapat dilakukan dengan melakukan prosedur Ubah Data, Koreksi maupun Ubah Kondisi.
  - b. Pengendalian proses  
Pengendalian ini pada dasarnya telah terintegrasi di dalam sistem, seperti pengelompokan barang berdasarkan klasifikasinya. Terdapat fungsi penolakan secara otomatis apabila penginputan data tidak sesuai dengan klasifikasi BMD.
  - c. Pengendalian *output*  
Pengendalian *output* dilakukan dengan verifikasi oleh masing-masing SKPD selaku entitas akuntansi dan Pembantu Pengelola Barang selaku entitas pelaporan pada saat penyusunan Laporan BMD. Apabila *output* yang dihasilkan benar dan akurat maka informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan penyusunan LKPD, namun apabila terdapat kesalahan maka dilakukan proses koreksi.

### **3.3. Karakteristik Kualitas Informasi/Output SIMDA-BMD**

Untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara output yang dihasilkan dari aplikasi SIMDA-BMD yang diimplementasikan pada Pemerintah Kabupaten

Banjarnegara dibandingkan dengan beberapa karakteristik kualitatif informasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Relevan

Informasi yang dihasilkan dari aplikasi SIMDA-BMD yang diimplementasikan pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah memuat informasi yang dapat mempengaruhi keputusan Pengelola Barang Milik Daerah yaitu:

a. Memiliki manfaat prediktif

Laporan BMD yang dihasilkan dari aplikasi SIMDA-BMD telah dapat menyajikan jenis, jumlah dan kondisi barang yang dikelola secara akurat. Laporan tersebut dapat dijadikan dasar bagi Pengelola Barang dalam melakukan perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran dan pengadaan barang milik daerah.

b. Memiliki manfaat umpan balik

Laporan BMD dari aplikasi SIMDA-BMD mampu memungkinkan Pengelola Barang untuk mengetahui hasil penerapan kebijakan yang telah ditetapkan selanjutnya dan memperbaiki kesalahan di masa lalu.

2. Andal

Informasi yang dihasilkan dari aplikasi SIMDA-BMD yang diimplementasikan pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara belum sepenuhnya memenuhi karakteristik andal dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Lengkap

Menu Laporan di aplikasi SIMDA-BMD dapat menyajikan Laporan BMD pada sebagian besar tahapan pengelolaan BMD mulai dari perencanaan sampai dengan penghapusan.

1) Pada sub menu Perencanaan dan Pengadaan, dapat disajikan Daftar Rencana Kebutuhan Barang, Daftar Rencana Kebutuhan Pemeliharaan, Daftar Kebutuhan Barang, Daftar Kebutuhan Pemeliharaan, Daftar Pengadaan Barang dan Daftar Hasil Pemeliharaan.

2) Pada sub menu Penatausahaan, dapat disajikan Kartu Inventaris Barang (KIB A-F), Kartu Inventaris Ruang (KIR), Buku Inventaris, Rekap Buku Inventaris, Buku Inventaris Gabungan, Label Barang, Laporan Mutasi Barang, Rekap Barang per Jenis Barang, Data Pembayaran Kontrak dan Laporan Barang Berdasarkan Kondisi.

3) Pada sub menu Penggunaan dan Penghapusan, dapat disajikan SK Penggunaan Barang, Lampiran SK Penghapusan, Daftar Barang yang Dihapus dan Pemanfaatan Barang.

4) Pada sub menu Akuntansi, dapat disajikan Buku Inventaris Intra Komptabel, Buku Inventaris Ekstra Komptabel, Rekapitulasi Barang ke Neraca, Daftar Aset. Di dalam sub menu ini telah terdapat pilihan laporan Daftar Penyusutan Aset Tetap namun dalam pelaksanaannya, pilihan tersebut tidak dapat dioperasikan sehingga dapat mengurangi nilai manfaat dari aplikasi tersebut. Rahmawati (2012) juga menyimpulkan bahwa dengan adanya item yang tidak dapat dioperasikan dalam aplikasi SIAKAD dapat mengurangi kegunaan dari aplikasi tersebut.



b. Bebas dari kesalahan

Informasi yang dihasilkan aplikasi SIMDA-BMD dari segi jenis, jumlah dan kondisi BMD telah disajikan secara akurat. Namun informasi nilai BMD yang dilaporkan belum sesuai kenyataan sebenarnya dan belum disesuaikan dengan kebijakan akuntansi yang berlaku pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, hal ini disebabkan aplikasi SIMDA-BMD belum mengakomodir dilakukannya penyusutan sehingga nilai buku yang dilaporkan masih sama dengan nilai perolehannya. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hari Laksono (Laksono, 2015) yang telah melakukan evaluasi implementasi SIMDA-BMD di Kabupaten Klaten bahwa tidak akuratnya informasi yang dihasilkan SIMDA-BMD disebabkan oleh penginputan data BMD yang tidak lengkap.

c. Netral

Informasi yang dihasilkan dari aplikasi SIMDA-BMD telah diarahkan pada prinsip transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu.

3. Komparatif

Laporan BMD yang disajikan dari aplikasi SIMDA-BMD dapat dibandingkan dengan Laporan BMD dari Instansi lain yang menerapkan program aplikasi yang serupa.

4. Konsisten

Aplikasi SIMDA-BMD mampu menghasilkan informasi yang sama selama beberapa periode akuntansi.

**4. Kesimpulan**

Dari hasil analisis dan pembahasan makalah tersebut dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Aplikasi SIMDA-BMD yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sebagai aplikasi berbasis komputer yang secara terintegrasi cukup baik dalam membantu pemerintah mengelola barang milik daerah. Prosedur pengelolaan BMD yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagian besar telah diimplementasikan oleh aplikasi SIMDA-BMD. Namun aplikasi tersebut terdapat kekurangan yaitu prosedur akuntansi belum dapat diterapkan karena fungsi sub menu penyusutan belum diakomodir.
2. Pengendalian intern yang diterapkan oleh aplikasi SIMDA-BMD sudah memadai, ditunjukkan dengan adanya pengendalian komputer, pengendalian fisik dan pengendalian aplikasi.
3. Aplikasi SIMDA-BMD telah dapat menghasilkan informasi dengan kualitas relevan, namun belum sepenuhnya andal karena nilai buku yang dilaporkan masih sama dengan nilai perolehannya, hal ini disebabkan aplikasi belum mempunyai fasilitas penyusutan.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan untuk perbaikan pengembangan aplikasi antara lain:

1. Agar aplikasi SIMDA-BMD dilakukan perbaikan pada menu akuntansi dengan menambahkan prosedur penyusutan, sehingga informasi yang dihasilkan oleh aplikasi dapat menyajikan nilai buku yang relevan, andal dan wajar sesuai dengan kondisi BMD yang sebenarnya. Dengan penambahan fungsi penyusutan

- tersebut, aplikasi akan mampu mengakomodir kebijakan akuntansi yang berlaku pada Pemerintah Daerah setempat.
2. Untuk memudahkan penggunaan, pengembangan aplikasi berbasis web sangat diperlukan. Sehingga memperlancar fungsi verifikasi dan koordinasi terkait pengelolaan BMD.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Muhammad., Ayasra, Ahmad., Zaideh, Farah. (2013). Issues and Problems Related to Data Quality in AIS Implementation. *International Journal of Latest Research in Science and Technology*. Vol. 2 Issue. 2 Page 17 – 20;
- Alfian, Mohammad. (2014). Analisis Faktor Pendukung Implementasi SIMDA dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD (Penelitian pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo). *3<sup>rd</sup> Economics & Business Research Festival*. Hal. 1698 – 1712;
- Arifin, Wiwin dan Wulandari, Ayu. (2014). Analisis Sistem Pengendalian Intern Sebelum dan Sesudah Penerapan SIMAK BMN pada Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Pangkalan TNI Angkatan Laut Banten. *Jurnal Akuntansi*. Vol 1. No. 1 Hal. 1-74;
- BPKP. (2015). Pengenalan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Retrieved from: <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/Versi-2.1.bpkp>;
- Dewi, Andini Kusuma. (2014). Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah) Terhadap Kepuasan Pengguna Akhir. (Studi Kasus pada Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau);
- Hall, James A. (2011). *Accounting Information Systems*. 7<sup>th</sup> edition. Ohio: Cengage Learning;
- Iskandar, Deni. (2015). Analysis Of Factors Affecting The Success Of The Application Of Accounting Information System. *International Journal Of Scientific & Technology Research*. Vol. 4 No. 2;
- Kabupaten Banjarnegara. (2012). Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Banjarnegara;
- Kieso, Donald E., Weygandt, Jerry J & Warfield, Terry D. (2010). *Intermediate Accounting IFRS Edition*. New York: John Wiley & Sons. Inc;
- Laksono, Hari. (2015). Evaluasi Kesuksesan Sistem Informasi Manajemen Daerah-Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) pada Pemerintah Kabupaten Klaten.
- Nugraha, Adi Harmadhani dan Astuti, Yuli Widi. (2013). Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan) dalam Pengolahan Data Keuangan pada Organisasi Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk). Vol.2 No.1 Hal. 23-33;

- Putra, Trio Mandala. (2013). Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada CV. Kombos Manado. Vol. 1 No. 3, Hal. 190-198;
- Rahayu, Nuraini., Karamoy, Herman., Pontoh, Winston (2014). Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Negara Pada Pengadilan Tinggi Agama Manado. Vol. 2 No. 1, Hal. 11-20;
- Rahmawati. (2012). Analisis Penerapan Sistem Informasi Akademik (SIKAD) Online Di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 3 No. 1 Hal. 25-31;
- Ratnaningsih, Kadek Indah dan Suaryana, I Gusti Ngurah Agung. (2014). Pengaruh Kecanggihan Teknologi Informasi, Partisipasi Manajemen, Dan Pengetahuan Manajer Akuntansi pada Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi. Vol. 6 No. 1 Hal. 1-16;
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Sambasivam, Yuvaraj. (2013). Evaluating the Design of Accounting Information System and its Implementation in Ethiopian Manufacturing Industries. *Research Journal of Science & IT Management*. Vol. 02 No. 07 Pages 16 – 29.